

Judul : Jumlah Dokter Spesialis Masih Kurang	Wartawan :	Penulis: Indriyani Astuti
Media : mediaindonesia.com	Nada Pemberitaan : Netral	
Tanggal : 13-Dec-2018	NewsValue : 34875000	
Halaman : 1	AdValue : 11857500	

```
(function(d,a){d[a]=d[a]||function(){(d[a].q=d[a].q||[]).push(arguments);}}(window,'dable'));
dable('renderWidget', 'dablewidget_2XLxVXLXO');
```

KUALITAS dokter multak ditingkatkan dalam implementasi Cakupan Kepesertaan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) terkait pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional. UHC dimaksudkan agar 95% penduduk Indonesia menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek memaparkan rasio dokter umum pada 2017 sudah lebih dari yang dibutuhkan. Jumlahnya 47,6 per 100 ribu penduduk. Sementara untuk dokter spesialis masih sangat kurang. Rasionya belum sesuai target, dari 14,6 per 100 ribu penduduk baru terealisasi 10.

"Mengenai dokter, masalahnya pada jumlah kualitas dan distribusi. Lulusan dokter umum sudah terlalu banyak 10 sampai 12 ribu yang lulus per tahun. Tapi kebanyakan di perkotaan," terang Menkes se usai menghadiri acara Sarasehan Nasional Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) di Jakarta, Kamis (13/12).

Mengenai kebutuhan dokter dan pemerataannya, KKI berperan dalam memberikan rekomendasi pembukaan fakultas kedokteran dan menjaga kualitas pendidikan kedokteran.

Baca Juga: Presiden Jokowi Dukung Perubahan Dunia Kedokteran

Ketua KKI Professor Bambang Supriyatno mengakui jumlah dokter spesialis memang masih kurang. Salah satu kendalanya ialah tidak semua fakultas kedokteran (FK) dapat membuka pendidikan spesialis. Hanya FK yang akreditasinya sudah A, terang Prof Bambang, yang diperbolehkan membuka pendidikan spesialis. Sejauh ini baru 18 FK yang mendapatkan akreditasi A.

"Dari konsil menghendaki di FK yang akreditasinya A. Kita imbau terus supaya produksi untuk spesialis cukup. Tidak boleh dilakukan di universitas biasa saja," paparnya

Jumlah dokter spesialis diperkirakan mencapai 30.000, sementara dokter umum sebanyak 120.000 orang.

Akreditasi Faskes

Salah satu upaya memastikan mutu pelayanan kesehatan ialah melalui akreditasi. Namun, akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit belum sepenuhnya dapat diselesaikan.

Data Kementerian Kesehatan, akreditasi puskesmas secara kumulatif dari 2015 hingga 2018 kurang dari 50% yakni sebanyak 4.769 puskesmas terakreditasi dari total 9.825. Sementara untuk rumah sakit, ada 1.606 rumah sakit terakreditasi dari total 2.776.

"Ini tetap kita kawal betul. Untuk rumah sakit diharapkan akreditasi Desember ini habis. Kalau belum akreditasi RS tidak bisa kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan," imbuhnya.

Menkes pun menyampaikan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi Bidang Kesehatan 2018 sehingga pemerintah daerah dapat membangun puskesmas di daerah tertinggal dan perbatasan.

Pada 2017, telah dibangun 110 Puskesmas perbatasan di 48 kabupaten/kota dan 2018 dibangun 256 Puskesmas di 49 kabupaten/kota. Meski demikian, permasalahannya bukan hanya membangun puskesmas, tetapi, imbuh Menkes, perlu dipikirkan distribusi tenaga kesehatan termasuk dokter yang belum merata di seluruh wilayah.(OL-5)